



## WALIKOTA BANDUNG

### PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1325 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 388 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 303 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian melalui pemeriksaan pajak serta untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak serta upaya optimalisasi dan peningkatan sistem pemungutan Pajak Hiburan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;
  2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 303 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 388 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 303 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 67, angka 68, angka 70, angka 71, dan angka 73 dihapus, diantara angka 68 dan angka 69 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 68A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak ...

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.

16. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Dinas.
17. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
18. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Hiburan yang bersifat insidental adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidental atau tidak tetap dengan menggunakan tanda masuk.
21. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
23. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
24. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
25. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
26. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.

27. Pertunjukan ...

27. Pertunjukan film yang dipasarkan (preview film) adalah pertunjukan film yang diselenggarakan di tempat tertentu dengan maksud memperkenalkan film baru atau yang akan dipasarkan oleh pemilik dan/atau importir film kepada pengusaha bioskop, pers dan kalangan terbatas, dengan dipungut bayaran.
28. Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk arena melantai yang dipandu oleh penata lagu (*disc-jockey*) serta dilengkapi dengan fasilitas bar.
29. Musik hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung pada restoran, bar dan sejenisnya.
30. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau minuman.
31. Klub malam adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa, menyediakan jasa pelayanan pramuria, serta pelayanan makanan dan/atau minuman.
32. Panti pijat atau Griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat relaksasi dan kebugaran.
33. Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan menyediakan tenaga pemijat.
34. SPA (*Sante Par Aqua*) adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.
35. Bola sodok (*bilyar*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman.
36. Golf driving adalah latihan memukul untuk mengukur jarak dan akurasi pukulan dalam permainan golf lapangan.

37. Golf ...

37. Golf lapangan adalah permainan dengan menggunakan bola kecil yang keras dipukul dengan tongkat pemukul khusus diarahkan ke hole-hole (9 atau 18 hole) satu demi satu di lapangan rumput terbuka.
38. Pacuan Kuda adalah lomba siapa cepat dengan menunggangi kuda di lapangan yang khusus dibuat untuk tempat kuda berpacu.
39. Bowling adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
40. Permainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
41. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
42. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
43. Bon penjualan atau bill, faktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak.
44. Porporasi/legalisasi adalah tanda pengesahan dari Dinas Kota Bandung atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di masyarakat.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Surat ...

46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.

53. Keputusan ...

53. Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
55. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
57. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

62. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
63. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
67. Dihapus.
68. Dihapus.
- 68A. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Dinas.
69. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
70. Dihapus.
71. Dihapus.
72. Dihapus.

73. Banding ...

73. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
74. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan, yang diajukan oleh Wajib Pajak.
75. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Jenis pajak hiburan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak hiburan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN.
- (2a) Wajib Pajak Hiburan yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak diterbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak.
- (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan STPD, Keputusan Keberatan Pajak, Keputusan Penolakan Keberatan Pajak, Keputusan Pembatalan Pajak, Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak, Keputusan Penghapusan Piutang Pajak, Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak, Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak.

(4) Walikota ...

- (4) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, STPD, Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perjanjian Angsuran, Surat Perjanjian Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak, Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Walikota.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas, dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
- a. mengambil sendiri ke Dinas;
  - b. dikirim oleh petugas Dinas; atau
  - c. mengakses secara online pada situs Dinas.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
- a. fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);
  - b. fotocopy akte pendirian (untuk Badan Usaha);
  - c. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau fotocopy perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang.

(5) Terhadap ...

- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

- (1) Kepala Dinas membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
  - b. wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
  - c. rekomendasi dari Kepala Bidang kepada Kepala Dinas sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan bahwa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

5. Diantara ...

5. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (4a), (4b), (4c), Ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
  - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. rekapitulasi penggunaan Tiket Masuk.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan Surat Teguran.
  - (4a) Petugas Dinas melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4b) Berdasarkan penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4a):
    - a. apabila SPTPD dinyatakan lengkap maka SPTPD diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD;
    - b. apabila SPTPD tidak lengkap maka SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPTPD.
  - (4c) Terhadap SPTPD yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a, dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPTPD.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:
  - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(4b) huruf b.
- (6) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPTPD dianggap tidak disampaikan.

6. Diantara ...

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Dinas dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah secara *Online*.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah satu huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
  - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
  - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
  - e. Penerbitan Surat Peringatan atau teguran tahap kedua, dapat disertai penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

(1) Dalam hal utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Dinas berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling kurang 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Walikota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah yang bertujuan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;
  - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
  - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
  - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya.

e. Wajib ...

- e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
  - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan; atau
  - g. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.
13. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40A

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - d. pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

14. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) diubah, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Walikota dalam pelaksanaan pemeriksaan memberikan wewenang kepada Kepala Dinas untuk membentuk Tim Pemeriksa yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik terhadap setiap aset yang dikelola Wajib Pajak.
- (3) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan dilaksanakan dengan persiapan melalui:
    1. kesesuaian dengan tujuan pemeriksaan; dan
    2. mendapat pengawasan yang seksama.
  - b. luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui:
    1. pencocokan data;
    2. pengamatan;
    3. permintaan keterangan;
    4. konfirmasi;
    5. teknik sampling, dan/atau
    6. pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  - d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak;
  - e. tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih orang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksa;
  - f. apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
  - g. pemeriksaan ...

- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Pendokumentasian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) wajib disusun oleh pemeriksa pajak yang memuat paling sedikit:
  - 1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
  - 2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
  - 3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  - 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) harus memberikan gambaran mengenai:
  - 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
  - 2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  - 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
  - 4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu terkait dengan pemeriksaan.

16. Ketentuan ...

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Hasil pemeriksaan pajak disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat:
  1. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
  2. memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
  3. memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain:
  1. penugasan pemeriksaan;
  2. identitas Wajib Pajak;
  3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
  4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
  5. data/informasi yang tersedia;
  6. buku dan dokumen yang dipinjam;
  7. materi yang diperiksa;
  8. uraian hasil pemeriksaan;
  9. penghitungan pajak terutang;
  10. simpulan dan usul pemeriksa pajak.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Jenis pemeriksaan meliputi:

- a. pemeriksaan kantor; dan/atau
- b. pemeriksaan lapangan.

18. Ketentuan ...

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Kegiatan pemeriksaan kantor dilakukan sebagai berikut:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan/atau
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan sebagai berikut:

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya apabila tidak dapat dipinjam dari wajib pajak;
- c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima apabila dapat dipinjam dari wajib pajak;
- d. memasuki serta melakukan pemeriksaan pada tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat tempat lain yang dianggap penting;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak berada ditempat pada saat pemeriksaan; dan/atau

f. meminta ...

- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemeriksaan kantor.

20. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46A

- (1) Pemeriksaan kantor untuk tujuan lain dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

21. Di antara ...

21. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan memahasnya bersama bidang yang menangani perpajakan.
- (2) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (3) Apabila Tim Pemeriksa menemukan unsur pidana, wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat dalam 3 (tiga) hari setelah diterima SPHP dan dilampiri dengan bukti pendukung dan sanggahan seperlunya.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindak lanjuti, maka Wajib Pajak dinyatakan menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Hasil (SP2H).
- (7) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pajak, maka pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Daerah dan/atau unsur pidana.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014  
WALIKOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 31 Desember 2014

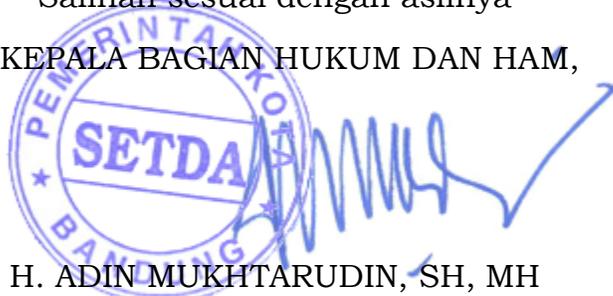
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
Pembina TK. I  
NIP. 19610625 198603 1 008



Nama Jelas :	
Tanda Tangan	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
Diterima tanggal	NPWPD yang diberikan :
Nama Jelas/NIP	<input type="text"/>
Nama Jelas/NIP :	
Tanda Tangan	

## 2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK HIBURAN

<b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b> Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	No. SPTPD : ..... Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK HIBURAN</b>	
<b>N.P.W.P.D</b> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kepada Yth : ..... ..... di .....
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap (5) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak <input type="text"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pelayanan Pajak paling lambat 15 hari Kalender 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.	
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</b>	
1. Golongan Hiburan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	01. Tontonan film 02. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 03. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 04. Pameran bersifat komersil 05. Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya 06. Sirkus, akrobat, dan sulap 07. Permainan bilyar, golf driving, golf lapangan, dan boling 08. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 09. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ( <i>fitness centre</i> ) 010. Pertandingan olah raga
2. Menggunakan Kas Register <input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak
3. Mengadakan pembukuan/pencetakan <input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak
4. Mengadakan Bon <input type="checkbox"/>	1. Ya 2. Tidak
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK</b>	
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)	
a. Masa Pajak	: Tgl .....s/d Tgl .....
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	: Rp. ....
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: ..... %
d. Pajak terutang (b x c)	: Rp. ....
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen)	
a. Masa Pajak	: Tgl .....s/d Tgl .....
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	: Rp. ....
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: ..... %
d. Pajak terutang (b x c)	: Rp. ....
<b>C. PERNYATAAN</b>	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyalakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas	

....., tahun .....

Wajib Pajak

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas

**D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA**

Diterima tanggal :  
Nama Petugas :  
NIP :

ttd  
(.....)  
NIP.

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PELAYANAN PAJAK  
Jl. Wastukencana No. 2  
Telp. (022) 4235052  
Fax (022) 4208604  
BANDUNG

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**TANDA TERIMA**

Nama : .....

: .....

Alamat : .....

: .....

Telah Menerima : .....

: .....

: .....

: .....

Bandung, .....  
Yang Menerima

(.....)



## 5. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

<b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b> Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	<b>SKPDKB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>																										
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo : .....																												
<p>I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Nama Pajak : ..... <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));	Rp.	b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administrasi																												
a. Bunga (Pasal 65 ayat (2));	Rp.																											
b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3));	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____																											
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>																												
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.																												
Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  _____ NIP.																												
..... Gunting disini .....																												
No. SKPDKB .....																												
<b>TANDA TERIMA</b>																												
NPWPD	:	.....																										
Nama	:	.....																										
Alamat	:	.....																										
		.....Tahun.....																										
		Yang Menerima																										
		(.....)																										







## 9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

<b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>DINAS PELAYANAN PAJAK</b> Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung	<b>SKPDLB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....	No. Urut <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>																																				
Nama : ..... Alamat : ..... NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Tanggal jatuh tempo : .....																																						
<p>I. Berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 76 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> Ayat Pajak : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Nama Pajak : .....																																						
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administrasi ( a )</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )		Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp	5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp		b. Jumlah sanksi administrasi ( a )		Rp	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )		Rp
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																				
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																				
3. Kredit Pajak																																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																					
b. Lain-lain	Rp.																																					
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.																																					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b - c )		Rp.																																				
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp																																				
5. Sanksi administrasi																																						
a. Bunga (Pasal 74 ayat (1)) / Pasal 76 ayat (6)	Rp																																					
b. Jumlah sanksi administrasi ( a )		Rp																																				
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar ( 4 + 5b )		Rp																																				
Dengan huruf <input style="width: 600px; height: 20px;" type="text"/>																																						
<p><b>PERHATIAN :</b>          Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p>																																						
Bandung, .....Tahun..... a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  _____ NIP.																																						
..... Gunting disini .....																																						
No. SKPDLB .....																																						
<b>TANDA TERIMA</b>																																						
NPWPD	:	.....																																				
Nama	:	.....																																				
Alamat	:	.....																																				
		.....Tahun.....																																				
		Yang Menerima																																				
		(.....)																																				

## 10. BENTUK SURAT TEGURAN.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

.....

.....

Di .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada .....

Bandung, .....Tahun.....

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

.....

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

## 11. BENTUK SURAT PERINGATAN.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Kepada Yth,

.....

.....

Di .....

BANDUNG

**SURAT PERINGATAN**

Nomor : .....

Berdasarkan pembukuan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Hiburan ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak ..... Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp ..... (.....)

Masa Pajak .....

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Dinas Pelayanan Pajak pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

Petugas,

-----

-----

NIP .....

Penerima,

-----

## 12. BENTUK SURAT PAKSA.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT - PAKSA**

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, .....

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

## 13. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA.

**BERITA ACARA**  
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bertempat tinggal di ..... berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal .....

**MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI**

Kepada Saudara : .....  
 Bertempat tinggal di : .....  
 Berkedudukan sebagai : .....

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 Jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebesar Rp.....  
 (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada .....  
 Bertempat tinggal di .....  
 Disebabkan .....

Yang menerima  
Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

-----  
NIP

## 14. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN**

Nomor : .....

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ :  
 Penanggung Pajak .....

NPWPD :

Alamat .....

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor .....  
 tanggal ..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih  
 harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada : Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota  
 Bandung

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
  2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
  3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
  4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung, .....

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

(.....)  
 NIP.

15. BENTUK BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA**

Nomor .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun ..... atas kekuatan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di Jl. .... Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal ..... Nomor ..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. .... dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

1. .... Pekerjaan .....
2. .... Pekerjaan .....

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak : .....

NPWPD :

Alamat : .....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....	.....
.....	.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....
.....	.....	Rp .....

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :  
.....  
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi – Saksi

1. ....( .....
2. ....( .....

16. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN  
TUNGGAKAN PAJAK.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

	Bandung, .....
Nomor :	Kepada Yth,
Sifat :	.....
Lampiran :	.....
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-barang Sitaan atas tunggakan Pajak	Di .....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di .....  
Yang telah menunggak Pajak ..... sebesar Rp .....  
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung untuk  
dilelang di muka umum

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp .....  
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

( ..... )  
NIP

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

	Bandung, .....
<p>Nomor :                  Lampiran :                  Perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran/                  Penundaan Pembayaran Pajak</p>	<p>Kepada Yth,                  Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak                  Kota Bandung                  di  <u>BANDUNG</u></p>
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama :</p> <p>Nama/Merek Usaha : .....</p> <p>NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Alamat : .....</p> <p style="text-align: right;">.....Tlp.....</p>	
<p>Dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran /Penundaan Pembayaran Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No .....</p> <p>Bulan..... Tahun .....</p> <p>Jumlah Rp .....</p> <p>dengan alasan .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih</p>	
	<p>Hormat kami,                  Wajib Pajak/Penanggung Pajak</p> <p>(.....)</p>
<p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

## 18. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN.

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

**SURAT PERJANJIAN ANGSURAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ..... sebanyak .....kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a	SKPDKB	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
b	SKPDKBT	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
c	STPD	No. ....	Tgl. ....	<u>Rp. ....</u>
		No. ....	Tgl. ....	<u>Rp. ....</u>

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran
a	Tgl. ....Angsuran Ke 1	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
b	Tgl. ....Angsuran Ke 2	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
c	Tgl. ....Angsuran Ke 3	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
d	Tgl. ....Angsuran Ke 4	<u>Rp. ....</u>	<u>Rp. ....</u>	<u>Rp. ....</u>
		<u>Rp. ....</u>	<u>Rp. ....</u>	<u>Rp. ....</u>

2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
 Kota Bandung

Bandung,.....  
 Wajib/Penanggung Pajak

(.....)  
 NIP

(.....)

## 19. BENTUK SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

**SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

3. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal ....., terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a	SKPDKB	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
b	SKPDKBT	No. ....	Tgl. ....	Rp. ....
c	STPD	No. ....	Tgl. ....	<u>Rp. ....</u>
		No. ....	Tgl. ....	<u>Rp. ....</u>

Penundaan akan dibayar seluruhnya berikut bunga sebesar 2% pada tanggal.....Tahun....

4. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
 Kota Bandung

(.....)  
 NIP

Bandung,.....  
 Wajib/Penanggung Pajak

(.....)

20. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK.

Bandung, .....

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di  
BANDUNG

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan  
Keberatan Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD

Alamat : .....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas  
SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) No .....  
Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp .....  
dengan alasan .....

.....  
.....  
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

## 21. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK.



## WALIKOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

TENTANG  
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

## MEMUTUSKAN

PERTAMA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) :

Nomor : .....

Nama/Merek Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung : .....

Pajak

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/ditambah dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**WALIKOTA BANDUNG**

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150  
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

## 22. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK.



WALIKOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN**

NOMOR : .....

TENTANG  
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

## MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Surat Permohonan keberatan Pajak Hiburan Nomor :

.....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD

Berhubung : .....

.....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**WALIKOTA BANDUNG**

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150  
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

\*) Coret yang tidak perlu

23. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

	Bandung, .....
Nomor : Lampiran : Perihal : Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan	Kepada Yth, Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di <p style="text-align: center;"><u>BANDUNG</u></p>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :	.....
Alamat :	.....
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha :	.....
NPWPD :	<input type="checkbox"/>
Alamat :	.....
	.....
	.....Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) No ..... Bulan..... Tahun ..... Jumlah Rp ..... dengan alasan ..... ..... ..... .....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami, Wajib Pajak/Penanggung Pajak  (.....)
*) Coret yang tidak perlu	

## 24. KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK HIBURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 – Bandung

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN**

**Menimbang** : Surat Permohonan Pembetulan ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD :

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Pembetulan ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
 Nomor : .....  
 Nama/Merek Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD

Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....  
 Semula ditetapkan : Rp. ....  
 Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp. ....  
 jumlah  
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
 Dengan huruf .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

(.....)  
NIP.....

## 25. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN**

**Menimbang** : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD :

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN :**

**PERTAMA** : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD

**Berhubung** : .....

**KEDUA** : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

## 26. KEPUTUSAN PEMBATALAN



WALIKOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PEMBATALAN PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

## MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pembatalan ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
 Nomor : .....  
 Nama/Merek Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD

Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....  
 Semula ditetapkan : Rp. ....  
 Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp. ....  
 jumlah  
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
 Dengan huruf .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150  
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

## 27. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN



WALIKOTA BANDUNG

**KEPUTUSAN**

NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN :**

PERTAMA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD

Berhubung : .....  
 .....

KEDUA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**WALIKOTA BANDUNG**

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150  
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

27A. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

Bandung, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala Dinas Pelayanan Pajak  
Kota Bandung  
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/Merek Usaha : .....

NPWPD

Alamat : .....

.....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*)

No .....

Bulan..... Tahun .....

Jumlah Rp .....

dengan alasan .....

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

## 28. KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....

NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....  
 Nama/Merek Usaha : .....  
 Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung : .....  
 Pajak  
 Semula ditetapkan : Rp. ....  
 Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp. ....  
 jumlah  
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
 Dengan huruf .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

(.....)  
NIP.....

## 29. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**

NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN**

**Menimbang** : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN :**

**PERTAMA** : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 : .....  
 NPWPD

**Berhubung** : .....

**KEDUA** : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....

30. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan yang Terutang  
Nomor .....

Tanggal : .....

Atas Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** : Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)

Nomor : .....

Nama/Merek Usaha : .....

Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak : .....

Semula ditetapkan : Rp. ....

Dikurangi/dibatalkan dengan jumlah : Rp. ....

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....

Dengan huruf .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

(.....)  
NIP.....

31. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**  
NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi  
Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak Hiburan  
Yang Terutang  
Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
:  
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2000;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut  
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan  
Daerah Kota Bandung;  
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak  
Hiburan

**MEMUTUSKAN :**

**PERTAMA** : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi  
Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak Hiburan  
Yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD\*)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
:  
NPWPD

Berhubung : .....

**KEDUA** : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG

(.....)  
NIP.....



## 33. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**KEPUTUSAN**

Nomor : .....

**TENTANG**  
**PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**  
**PAJAK HIBURAN**

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan  
 Nomor .....  
 Tanggal : .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....

NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;  
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;  
 6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;  
 7. Peraturan Walikota Nomor.....Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan

**MEMUTUSKAN**

PERTAMA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan berdasarkan (SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*)

Nomor : .....  
 Nama/Merek Usaha : .....  
 Alamat : .....

NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung : .....  
 Pajak  
 Semula ditetapkan : Rp. ....  
 Dikurangi dengan jumlah : Rp. ....  
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
 Dengan huruf .....

KEDUA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diktum pertama dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di  
pada tanggal

**KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KOTA BANDUNG**

(.....)  
NIP.....

## 34. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
 NOMOR .....

TENTANG

USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK HIBURAN

Menunjuk Peraturan Walikota No..... Tahun .... tentang....., maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak ..... untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Walikota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak : .....  
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak : .....  
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut : .....  
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya : .....
5. Jumlah Penghapusan : .....
6. Jumlah sampai sekarang : .....  
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
 KOTA BANDUNG

.....  
 NIP. ....

## 35. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

**WALIKOTA BANDUNG****KEPUTUSAN**

NOMOR: .....

TENTANG  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Dinas Pelayanan Pajak, terdapat piutang pajak Tahun Pajak ..... sampai dengan Tahun Pajak ..... pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, yang tidak dapat ditagih lagi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No...Tahun.....Tentang.....;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Dinas Pelayanan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun .... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor .....);

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor .... Tahun 2012 tentang.....;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

PERTAMA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajak .....pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp ..... (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Bandung menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal .....

**WALIKOTA BANDUNG,**

.....

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

## 36. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

Nomor : ..... Lampiran : - Perihal : <b>Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan</b>	Bandung, ..... Kepada Yth : ..... ..... <b>di</b> <u><b>B a n d u n g</b></u>
---	--

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal .....

Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal ..... s/d ..... berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor ..... tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

.....  
 NIP. ....

## 37. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)**

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....  
 Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha : .....
2. Alamat Usaha : .....
3. Jenis Usaha : .....
4. NPWPD : .....

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal ..... Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

38. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)**

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor.....  
Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Wajib/Penanggung Pajak : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Alamat : .....

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

- 1. Nama Usaha : .....
- 2. Alamat Usaha : .....
- 3. Jenis Usaha : .....
- 4. NPWPD : .....

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....

---

39. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN  
**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 022. 4235052 - Bandung

---

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN**  
**PENUNGGUAN**

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor..... Tanggal .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- 2. Jabatan : .....
- 3. Alamat : .....

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha : .....
- 2. Alamat Usaha : .....
- 3. Jenis Usaha : .....
- 4. NPWPD : .....

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggal .....s/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang membuat pernyataan :

.....



40. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

**BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak : .....
- Alamat Obyek Pajak : .....
- Waktu : .....s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Wajib Pajak

.....

**PIHAK KESATU**

Ketua Tim Pemeriksa

.....

NIP.

41. BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**  
Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

---

**BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. - Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

- Hari/Tanggal : .....
- Waktu : .....
- Tempat : .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
Wajib Pajak

**PIHAK KESATU**  
Ketua Tim Pemeriksa

.....

.....

NIP.

42. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

		Bandung, .....
Nomor	:	Kepada Yth :
Lampiran	: -	<b>BAPAK KEPALA DINAS</b>
Perihal	: <b>Pernyataaan Keberatan Terhadap Berita Acara Hasil Pembahasan Pemeriksaan</b>	<b>PELAYANAN PAJAK</b>
		di
		<b><u>B a n d u n g</u></b>

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan **keberatan** atas Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung,.....

Wajib Pajak

.....



## 44. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PELAYANAN PAJAK**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. 4235052 Bandung

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)**

Nomor : \_\_\_\_\_

**BAB I**

**IKHTISAR PEMERIKSAAN**

**A. Dasar Pemeriksaan**

1. Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Walikota No.....Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;

**B. Identifikasi Wajib Pajak**

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat Wajib Pajak : .....
4. Nama Usaha : .....
5. Alamat Usaha : .....
6. Nomor Telepon : .....
7. N P W P D : .....
8. Kuasa Wajib Pajak : .....
9. Masa Pajak : .....

**C. Gambaran Umum Wajib Pajak :**

1. Pendirian  
Berdasarkan Surat Izin .....
2. Bidang Usaha  
Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha ..... yang berlokasi di Jalan ..... Kota Bandung dengan kapasitas :
3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

**D. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

- 1. Metode Pembukuan : ( ) Kas ( ) Aktual
- 2. Proses Pembukuan Data Processing : ( ) Manual ( ) Elektronik
- 3. Periode :
- 4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : ( ) disusun sendiri ( ) Kantor Akuntan
- 5. Kapasitas : ( ) weekend ( ) weekday
- 6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : ( ) Sesuai standar ( ) Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum\*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

**E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (sesuai SOP Pemeriksaan)**

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

**BAB II**

**URAIAN HASIL PEMERIKSAAN**

**2.1. Pemeriksaan Keuangan**

**2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi**

.....  
 .....

**2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet**

.....  
.....

**2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)**

.....  
.....

**2.1.4. ....**

.....  
.....

**2.2. Pemeriksaan Fisik**

**2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan**

.....  
.....

**2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)**

.....  
.....

**2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)**

.....  
.....

**2.2.4. ....**

.....  
.....

**2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus**

**2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak**

.....  
.....

**2.3.2. Penetapan Tarif Usaha**

.....  
.....

**2.3.3. Managemen dan Organisasi**

.....  
.....

**2.3.4. ....**

.....  
.....

\*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT  
(Sesuai Hasil Pemeriksaan)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak .....

a.n. KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,

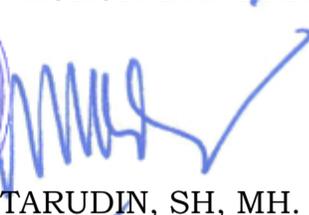
.....  
NIP.....

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.

Pembina TK. I

NIP. 19610625 198603 1 008